

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A . Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang membahas mengenai doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum yang memiliki keterkaitan dalam problematika yang akan dibahas, lalu membandingkannya antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup> Penelitian ini adalah analisis terhadap bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait maupun bahan hukum sekunder untuk memberikan jawaban permasalahan mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak percobaan tindak pidana pencurian diperberat yang tidak didampingi oleh penasehat hukum .

##### **B . Metode Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian hukum ini yakni meliputi:

###### **1. Pendekatan Perundang-undangan ( *Statute approach* )**

*Statute approach* atau pendekatan undang-undang merupakan pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>2</sup> Dalam melakukan penelitian ini

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, sinar grafika, Hlm 24

<sup>2</sup> Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi**, bayu media publishing malang, cetakan keenam, 2010, hlm 302

pendekatan dilakukan dengan menelaah, menganalisis dan membandingkan peraturan perundang-undangan, dan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan pembedaan bagi pelaku percobaan tindak pidana pencurian diperberat yang tidak didampingi penasehat hukum. Dimana didampingi penasehat hukum merupakan hak dari seorang tersangka dan menjadi kewajiban dari penegak hukum untuk menunjuk penasehat hukum untuk memberikan bantuan hukum terhadap tersangka.

## 2. Pendekatan kasus ( *case approach* )

*Case approach* atau pendekatan kasus dengan menganalisis terkait dengan putusan MA No : 1 K / PID / 2010. Dalam kasus tersebut bahwa pelaku tindak pidana percobaan pencurian dalam putusan tersebut merupakan seorang yang berprofesi sebagai sopir ikan merupakan warga yang tidak mampu yang disangka melakukan tindak pidana yang memiliki ancaman 7 tahun / diatas 5 tahun yang tidak mendapatkan haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum.

## **C . Sumber Bahan Hukum**

Penulis menggunakan dua jenis bahan hukum dalam penelitian ini. Jenis bahan hukum yang dimaksud adalah;

## 1 . Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bahan hukum yang bersifat mengikat, otoratif antara lain berupa peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Bahan hukum primer tersebut terdiri atas;

### a. Peraturan Perundang-undangan, yaitu

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( Pasal 56 ayat 1)
2. Kitab undang-undang hukum acara pidana ( Pasal 363 aat (1) ke – 4 dan 5 jo Pasal 53 ayat 1)
3. putusan MA no 1 k/pid/2010

## 2 . Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan termutahir, ataupun pengertian baru mengenai fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide).<sup>4</sup> Buku teks karena buku teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>5</sup> Literatur-literatur yang terkait permasalahan ilmiah yang memenuhi kualifikasi bahan hukum sekunder yang terkait permasalahan yang diteliti, antara lain adalah ;

---

<sup>3</sup> **Pedoman penulisan karya ilmiah program studi sarjana ilmu hukum, malang**, fakultas hukum universitas brawijaya.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm 29

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, kencana, Jakarta, 2005, Hlm 142

1. Buku-buku hasil penelitian dan makalah yang berisikan tentang hak-hak tersangka, akibat jika hak tersangka tidak dipenuhi dalam menjalani proses persidangan.
2. Pendapat serta doktrin para sarjana yang diperoleh melalui wawancara.
3. Literatur yang terkait dengan konsekuensi yuridis terhadap penegak hukum yang tidak melaksanakan kewajiban menunjuk penasehat hukum terhadap terdakwa yang diperoleh dari perpustakaan umum pusat kota Malang, perpustakaan pusat Universitas Brawijaya dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yaitu Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Artikel internet yaitu informasi terkait yang diperoleh dari internet.
5. Jurnal hukum yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

#### **D . Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Teknik memperoleh bahan hukum pada penelitian ini adalah dengan cara melakukan *library research* atau studi kepustakaan dan akses melalui internet. Teknik *library research* adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan objek kajian permasalahan yang akan diteliti yaitu sejumlah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur-literatur, dokumen, pendapat para sarjana, jurnal hukum dan artikel-artikel lainnya yang dapat mempertajam dan memperjelas konsep hukum. Dengan cara membaca, menelaah secara seksama, membuat catatan penting dari buku-buku serta peraturan perundang-undangan, dokumen, serta tulisan yang terkait dengan masalah dan objek penelitian.

Sehubungan dengan jenis penelitian normatif, untuk memperoleh informasi yang mendukung kegiatan penelusuran bahan hukum, maka digunakan metode pengumpulan (dokumentasi) bahan hukum primer juga bahan hukum sekunder . Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan dimana penulis mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Fungsi dari teknik memperoleh data bahan hukum ini dalam penelitian adalah untuk mencari jawaban dari rumusan masalah dengan menggunakan bahan hukum yang relevan atau berkaitan dengan permasalahan.

#### **E . Teknik Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis melalui penafsiran atau interpretasi.<sup>6</sup> Penulis menggunakan *doctrinal interpretation*. *doctrinal interpretation* memberikan deskripsi bahwa penafsiran ini disamping menjelaskan secara linguistik berbagai probabilitas makna suatu norma, *doctrinal interpretation* digunakan untuk memberikan justifikasi terhadap salah satu dari kemungkinan tersebut yang dipandang sebagai arti yang paling tepat.<sup>7</sup> Metode penafsiran yang dipilih dan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

---

<sup>6</sup> Pedoman penulisan karya ilmiah program studi sarjana ilmu hukum, op.cit., Hlm24

<sup>7</sup> Pendapat Jerzy Wroblewski yang dikutip oleh Bahder Johan Nasution dalam buku **Metode Penelitian Hukum**, Mandar Maju, Bandung, cetakan pertama Tahun 2008, Hlm 95

## 1 . Penafsiran Gramatikal

Penafsiran ini digunakan untuk menafsirkan seluruh bahan hukum berdasarkan ketentuan tata bahasa terhadap ketentuan yang secara tegas dimuat dalam redaksi yang tekstual. Metode ini digunakan untuk memahami bahan hukum yang ada dengan menerjemahkannya secara secara leksikal berkenaan dengan pembedaan bagi pelaku percobaan tindak pidana pencurian diperberat yang tidak didampingi oleh penasihat hukum dalam putusan MA nomor 1 k/pid/2010.

## 2 . Penafsiran Sistematis

Penafsiran ini digunakan oleh penulis untuk menginterpretasi bahan hukum berupa ketentuan peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan metode ini terhadap peraturan perundang-undangan satu dengan yang lain serta substansi norma yang dimuat di dalam norma tersebut. Metode ini digunakan penulis untuk menerjemahkan suatu norma dengan cara menafsirkan norma tersebut dari kaidah yang lebih tinggi menuju norma yang lebih rendah atau norma lainnya yang tingkatnya sederajat. Penafsiran ini digunakan terhadap produk hukum yang mengatur atau berkaitan bantuan hukum terhadap tersangka dalam setiap proses pemeriksaan.

## **F . Defenisi Konseptual**

Defenisi konseptual merupakan defenisi dari beberapa kata yang ada di dalam judul penelitian ini, yaitu;

### **1. Pemidanaan**

Pemidanaan merupakan suatu tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.

### **2. Tindak pidana percobaan pencurian**

Percobaan pencurian merupakan adanya suatu niatan untuk melakukan pencurian maupun sudah mulai melakukan tindakan pencurian tersebut namun tidak selesai bukan karena kemauan dari pelaku .

### **3. Terdakwa**

Terdakwa merupakan seorang tersangka yang diperiksa, diadili dan diadili disidang pengadilan. terdakwa merupakan seseorang yang diduga atau dituduh melakukan suatu tindak pidana dan mempunyai cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan persidangan

### **4. Penasehat Hukum**

Penasehat hukum merupakan orang yang memberi bantuan atau nasihat hukum terhadap orang yang sedang dalam proses pemeriksaan yang membutuhkan bantuan hukum.

